

SILABUS/SAP MATA KULIAH AKUNTANSI PEMERINTAHAN 3 SKS

- Judul Mata Kuliah** : **AKUNTANSI PEMERINTAHAN**
- Nomor Mata Kuliah/SKS** : 1611005 / 3 SKS
- Deskripsi singkat MK** : Dalam mata kuliah ini akan dibahas tentang kebutuhan akuntansi pemerintahan pada saat ini, pemahaman tentang berbagai peraturan dan ketentuan tentang pengelolaan keuangan Negara / Daerah, pemahaman tentang berbagai konsep-konsep dasar dan teknik-teknik akuntansi pemerintahan, pemahaman tentang berbagai informasi dan laporan keuangan Negara / daerah dalam organisasi birokrasi sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan.
- Tujuan Pembelajaran Umum** : Setelah mempelajari mata kuliah ini diharapkan :
- ❖ Menyadari, memahami tentang pentingnya dan strategisnya akuntansi pemerintahan dalam suatu Negara termasuk di Indonesia
 - ❖ Memahami posisi akuntansi pemerintahan dalam lingkup akuntansi
 - ❖ Memahami berbagai peraturan dan ketentuan tentang pengelolaan keuangan Negara/Daerah yang harus ditaati dalam organisasi birokrasi.
 - ❖ Memahami tentang kerangka konseptual akuntansi pemerintahan
 - ❖ Mampu menjelaskan dan melaksanakan tentang model-model dan teknik-teknik dalam akuntansi pemerintahan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan.
 - ❖ Mampu menyediakan berbagai informasi dan laporan keuangan Negara/Daerah yang diharuskan menurut undang-undang keuangan Negara.
- Metode Pengajaran** : Metode pengajaran diutamakan agar para mahasiswa termotifasi untuk penguasaan substansi dari teori-teori yang sudah dijelaskan dalam setiap pertemuan, sesuai dengan SAP yang telah ditetapkan, selanjutnya mahasiswa didorong untuk mampu mengaplikasikan teori-teori tersebut dengan cara pembahasan berbagai kasus dan berbagai masalah aktual yang relevan dengan bahan ajar.
- Secara keseluruhan dalam metode pengajaran tersebut selalu yang menjadi dasar dikaitkan dengan prinsip-prinsip dan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku pada saatnya.
- Setiap pembahasan disertai dengan berbagai pertanyaan yang ditujukan baik kepada individu mahasiswa secara langsung maupun ditawarkan kepada semua mahasiswa di kelas.
- Hasil pembahasan dilanjutkan dengan kewajiban mahasiswa membuat makalah yang harus dipresentasikan di kelas.

Program Studi Magister Akuntansi
Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama

Sistem Evaluasi PBM	:	<ul style="list-style-type: none">• Harus diperhatikan jumlah kehadiran yang disyaratkan yang memenuhi atau tidak memenuhi.• Aktivitas sehari-hari dalam proses belajar apakah termasuk berpartisipasi aktif atau pasif• Ketaatan melaksanakan tugas-tugas• Hasil UTS dan UAS• Partisipasi 20%• Penulisan & Penyajian Makalah Kelompok 20%• Ujian Tengah Semester 25%• Ujian Akhir Semester 25%• Kuis 10%
----------------------------	---	---

**Bahan Bacaan
Wajib**

- :
1. Freeman Shoulders; Governmental and Nonprofit accounting; Fourth edition; Prentice hall; 1993.
 2. Government Budgeting and expenditure control; Theory And Practice; International Monetary Fund
 3. David H. Rosenbloom; Public Administration; Random House; 1986
 4. J. Fred Weston & Thomas E. Copeland; Manajemen Keuangan; Bina Rupa Aksara, Jilid 1; 1995
 5. Standar Akuntansi Pemerintahan PP RI No. 71 Tahun 2010; Fokus Media; 2011
 6. Akuntansi Sektor Publik; Universitas Widyatama; 2010
 7. Mardiasmo; Akuntansi Sektor Publik; ANDI Jakarta; 2009
 8. Standar Akuntansi Pemerintahan; PP RI No. 24 Tahun 2005; Sinar Grafika; 2005.
 9. Abdul Halim; Akuntansi Sektor Publik ; Akuntansi Keuangan daerah; Salemba empat; 2004
 10. Indra Bastian; Sistem Akuntansi Sektor Publik; Salemba empat; 2003
 11. Karhi Nisjar; Aplikasi Akuntansi Pemerintahan di Indonesia; Dwi Karsa; 2003
 12. Pusat Pendidikan dan Pelatihan BPK RI; Standar Pemeriksaan Keuangan Negara; 2009
 13. Nurlan Darise; *Pengelolaan Keuangan Daerah*; Indeks Jakarta; 2009.
 14. J. Fred Weston & Thomas E. Copeland; Manajemen Keuangan; Bina Rupa Aksara, Jilid 2; 1997

Pilihan bacaan sesuai topik

- :
1. Undang-Undang otonomi daerah (baru); Undang-undang no. 32 tahun 2004; Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No 33 tahun 2004; perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah; pustaka pergaulan; 2004
 2. I Nyoman Tjager. Dkk. ; Corporate Governance; FCGL; 2003
 3. Bahtiar Arif, dkk; Akuntansi Pemerintahan; Salemba empat; 2002
 4. Muindro Renyowijoyo; Akuntansi Sektor Publik; akuntansi non laba ; mitra wacana Media; 2010
 5. J. Fred Weston, Dkk; Essentials of Canadian managerial finance; HRW; 1979
 6. Lembaga Administrasi Negara dan Pemerintah Republik Federal Jerman (DSE); Seminar dan studi Perbandingan tentang desentralisasi di republic Federal Jerman (buku I & II); 1993

Program Studi Magister Akuntansi
 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 32 ; Pedoman penyusunan APBD tahun 2009; Tamita Utama; 2009

Prasyarat : -

No.	Tujuan Pembelajaran Khusus	Pokok Bahasan	Sub. Pokok Bahasan	Chapter	Daftar Pustaka
1	Diharapkan para mahasiswa mendapat gambaran umum tentang akuntansi pemerintahan	Gambaran umum tentang berbagai terminology dasar dan dasar hukum tentang akuntansi pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian Akuntansi Pemerintahan dan Akuntansi bisnis 2. Perbedaan dan persamaan akuntansi pemerintahan dan akuntansi bisnis 3. Dasar hukum akuntansi pemerintahan 4. Tujuan akuntansi pemerintahan 5. Karakteristik akuntansi pemerintahan 6. Ruang lingkup akuntansi pemerintahan 7. Pemahaman tentang berbagai istilah dalam SAP pemerintahan 	Bab I Bab I & Bab X Bab I Bab I Bab XIII Bab I	<ul style="list-style-type: none"> • Aplikasi Akuntansi Pemerintahan di Indonesia; Dr. Karhi Nisjar S. Ak., M.M • Akuntansi Sektor Publik; Prof. Dr. Mardiasmo, MBA.Ak • Akuntansi Pemerintahan ; Bahtiar Arif Muchlis Iskandar • Akuntansi Sektor Publik ; Muindro Renyowijoyo • Government Budgeting and expenditure control • Akuntansi sektor publik ; UTAMA • Standar Akuntansi Pemerintahan ; PP RI No 71 tahun 2010
2	Diharapkan mahasiswa dapat memahami secara benar tentang kerangka konseptual akuntansi pemerintahan secara menyeluruh	Krangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> • Lingkungan akuntansi pemerintahan • Pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna • Entitas akuntansi dan pelaporan • Peranan dan tujuan pelaporan keuangan • Komponen laporan keuangan • Dasar hukum pelaporan keuangan • Asumsi dasar • Karakteristik kualitatif laporan keuangan • Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan • Kendala informasi yang relevan dan andal • Unsur laporan keuangan • Pengakuan unsur laporan keuangan • Pengukuran unsur 	Bab 7 Bab 4	<ul style="list-style-type: none"> • Akuntansi Sektor Publik ; Muindro Renyowijoyo • Akuntansi sektor publik ; UTAMA • Standar Akuntansi Pemerintahan ; PP RI No 71 tahun 2010

Program Studi Magister Akuntansi
Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama

			laporan keuangan		
3	Diharapkan mahasiswa memahami tentang keuangan Negara/Daerah sebagai dasar dalam aplikasi akuntansi pemerintahan pusat dan daerah	Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Pengertian keuangan Negara/daerah • Ruang lingkup keuangan Negara/daerah • Pengelolaan keuangan Negara/daerah • Pertanggungjawaban keuangan Negara/daerah • Pengawasan keuangan Negara/daerah 	<p>Bab II</p> <p>Bab II</p> <p>Bab III</p> <p>Bab III</p> <p>Bab III&IV</p> <p>Bab III</p>	<ul style="list-style-type: none"> • UU Keuangan Negara No 17 tahun 2003 • Pengelolaan keuangan Daerah; Drs.Nurlan Darise, Ak. M.Si • Akuntansi Pemerintahan ; Bahtiar Arif Muchlis Iskandar • Akuntansi Sektor Publik ; Muindro Renyowijoyo • Standar Pemeriksaan Keuangan Negara • Akuntansi Sektor Publik; UTAMA
4	Diharapkan mahasiswa akan lebih memahami tentang pentingnya anggaran Negara yang merupakan dokumen formal. Hasil kesepakatan eksekutif dan legislative yang menjadi Undang-undang	Sistem Anggaran Negara, Pusat dan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Pengertian dan perkembangan system anggaran Negara • Anggaran Negara sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal, dan alat pengendalian • Proses penyusunan anggaran Negara • Anggaran Negara yang berorientasi kinerja • Anggaran pendapatan dan belanja Negara • Anggaran pendapatan dan belanja Daerah • Pelaporan dan tanggungjawab 	<p>Chap 11</p> <p>Bab 12, 13 dan 14 Part 3,4,5,6</p> <p>Chap 1 butir 6</p> <p>Bab 3 hal 52</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Government Budgeting and expenditure control • Pengelolaan keuangan daerah • Governmental and nonprofit accounting • Essential of Canadian managerial finance • Standar akuntansi pemerintahan
5	Diharapkan mahasiswa bisa memahami dan menguasai tentang seluruh proses dalam sistem akuntansi dalam pemerintah pusat dan daerah	Sistem Akuntansi Pemerintahan Pusat dan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang lingkup dan ciri sistem akuntansi pemerintah pusat • Sistem Akuntansi pemerintah pusat • Sistem Akuntansi instansi • Laporan keuangan pemerintah pusat • Pengelolaan keuangan daerah 	<p>Bab VIII</p> <p>Bab XVII</p> <p>Bab VI</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Akuntansi Sektor Publik; UTAMA • Pengelolaan keuangan Daerah; Drs.Nurlan Darise, Ak. M.Si • Akuntansi Sektor Publik ; Muindro Renyowijoyo • Standar Akuntansi Pemerintahan ; PP RI No 71 tahun 2010
6	Diharapkan mahasiswa mampu menyusun dan menyiapkan berbagai	Penyajian Laporan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • Definisi • Tujuan laporan keuangan • Tanggung jawab pelaporan keuangan 	<p>Bab XXI</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan keuangan Daerah; Drs.Nurlan Darise, Ak. M.Si

Program Studi Magister Akuntansi
 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama

	informasi dari laporan keuangan /laporan keuangan Negara dan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan pusat dan daerah		<ul style="list-style-type: none"> • Komponen-komponen laporan keuangan • Struktur dan isi • Laporan realisasi anggaran • Laporan perubahan saldo anggaran lebih • Neraca • Laporan arus kas • Laporan operasional • Laporan perubahan ekuitas • Catatan atas laporan keuangan 	Bab VII Bab V Bab XIII Bab XIV Bab VIII BAB X	<ul style="list-style-type: none"> • Akuntansi Sektor Publik ; Muindro Renyowijoyo • Akuntansi Keuangan daerah; Prof. Dr. Abdul Halim • Government Budgeting and expenditure control • Governmental and nonprofit accounting • Akuntansi Pemerintahan ; Bahtiar Arif Muchlis Iskandar • Akuntansi Sektor Publik; Prof. Dr. Mardiasmo,MBA.Ak • Standar Akuntansi Pemerintahan ; PP RI No 71 tahun 2010
7	Diharapkan mahasiswa mampu menyusun gabungan daripada pelaporan keuangan Negara dan daerah dalam suatu entitas Pelaporan	Laporan Keuangan Konsolidasi	<ul style="list-style-type: none"> • Penyajian laporan keuangan konsolidasian • Entitas pelaporan • Entitas akuntansi • Badan layanan umum /Daerah • Prosedur konsolidasi • Pengungkapan 	Bab V Bab XIII Bab X Bab XXI Bab VII Bab XIV Bab VIII	<ul style="list-style-type: none"> • Akuntansi Keuangan daerah; Prof. Dr. Abdul Halim • Government Budgeting and expenditure control • Akuntansi Sektor Publik; Prof. Dr. Mardiasmo,MBA.Ak • Pengelolaan keuangan Daerah; Drs.Nurlan Darise, Ak. M.Si • Akuntansi Sektor Publik ; Muindro Renyowijoyo • Governmental and nonprofit accounting • Akuntansi Pemerintahan ; Bahtiar Arif Muchlis Iskandar • Standar Akuntansi Pemerintahan ; PP RI No 71 tahun 2010
8	Diharapkan mahasiswa memahami tentang perkembangan akuntansi	Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)	<ul style="list-style-type: none"> • Tujuan dan Asas BLU • Perencanaan dan Anggaran • Prinsip tata kelola • Dokumen pelaksanaan 	Bab XX	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan keuangan Daerah; Drs.Nurlan Darise, Ak. M.Si • Akuntansi Sektor

Program Studi Magister Akuntansi
Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama

	Pemerintahan untuk organisasi pemerintah yang memberikan pelayanan jasa dan nirlaba		<p>anggaran</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Pengelolaan utang dan piutang ● Pengelolaan barang ● Akuntansi, pertanggungjawaban keuangan dan kinerja 	<p>Bab I</p> <p>Bab XIV</p>	<p>Publik; Prof. Dr. Mardiasmo, MBA. Ak</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Akuntansi Keuangan daerah; Prof. Dr. Abdul Halim ● Governmental and nonprofit accounting ● Akuntansi sektor publik ; UTAMA
UTS					
9	Diharapkan mahasiswa mampu melaksanakan tugas-tugas audit dalam melakukan pemeriksaan dan pengawasan dalam laporan keuangan akuntansi pemerintahan	Pengawasan dan Pemeriksaan	<ul style="list-style-type: none"> ● Pengawasan dan pemeriksaan pemerintah dilakukan oleh BPKP ● Pengawasan dan pemeriksaan eksternal yang dilakukan oleh BPK ● Standar Pereriksaan keuangan Negara/ Daerah: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Standar Umum ◦ Standar Pelaksanaan ◦ Standar Pelaporan 		<ul style="list-style-type: none"> ● Aplikasi Akuntansi Pemerintahan di Indonesia; Dr. Karhi Nisjar S. Ak., M.M ● Akuntansi Sektor Publik; Prof. Dr. Mardiasmo, MBA. Ak ● Akuntansi Pemerintahan ; Bahtiar Arif Muchlis Iskandar ● Akuntansi Sektor Publik ; Muindro Renyowijoyo ● Government Budgeting and expenditure control ● Akuntansi sektor publik ; UTAMA ● Standar Akuntansi Pemerintahan ; PP RI No 71 tahun 2010
10	Diharapkan mahasiswa mampu menyusun laporan realisasi anggaran menganalisa dan memberikan interpretasi daripada LRA	Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas	<ul style="list-style-type: none"> ● Definisi ● Struktur laporan realisasi anggaran ● Periode pelaporan ● Tepat waktu ● Isi laporan realisasi anggaran ● Informasi yang disajikan dalam laporan realisasi ● Anggaran atau dalam catatan atas laporan keuangan ● Akuntansi pendapatan-lra ● Akuntansi belanja ● Akuntansi surplus/defisit-LRA ● Akuntansi pembiayaan ● Akuntansi penerimaan pembiayaan ● Akuntansi pengeluaran 		<ul style="list-style-type: none"> ● Aplikasi Akuntansi Pemerintahan di Indonesia; Dr. Karhi Nisjar S. Ak., M.M ● Akuntansi Sektor Publik; Prof. Dr. Mardiasmo, MBA. Ak ● Akuntansi Pemerintahan ; Bahtiar Arif Muchlis Iskandar ● Akuntansi Sektor Publik ; Muindro Renyowijoyo ● Standar Akuntansi Pemerintahan ; PP RI No 71 tahun 2010

Program Studi Magister Akuntansi
Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama





			<ul style="list-style-type: none"> pembiayaan • Akuntansi pembiayaan neto • Akuntansi sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SIKPA) • Transaksi dalam mata uang asing 		
11	Diharapkan mahasiswa mampu menyiapkan laporan arus kas dari pada hasil laporan akuntansi pemerintahan	Laporan Arus Kas	<ul style="list-style-type: none"> • Entitas pelaporan arus kas • Penyajian laporan arus kas • Pelaporan arus kas dari aktivitas operasi, • Investasi, pendanaan, dan transitoris • Pelaporan arus kas atas dasar arus kas bersih • Arus kas mata uang asing • Bunga dan bagian laba • Perolehan dan pelepasan investasi pemerintah dalam perusahaan negara/daerah/kemitraan dan unit operasi • Lainnya kas • Komponen kas dan setara kAS 		<ul style="list-style-type: none"> • Aplikasi Akuntansi Pemerintahan di Indonesia; Dr. Karhi Nisjar S. Ak., M.M • Akuntansi Sektor Publik; Prof. Dr. Mardiasmo, MBA.Ak • Akuntansi Pemerintahan ; Bahtiar Arif Muchlis Iskandar • Akuntansi Sektor Publik ; Muindro Renyowijoyo • Standar Akuntansi Pemerintahan ; PP RI No 71 tahun 2010
12	Diharapkan mahasiswa memahami dan mampu menganalisis dan mengungkapkan dari berbagai catatan laporan keuangan	Catatan atas Laporan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • Penyajian informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi • Penyajian informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro • Penyajian ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target • Dasar penyajian laporan keuangan dan pengungkapan kebijakan akuntansi keuangan • Asumsi dasar akuntansi • Pengguna laporan keuangan • Kebijakan akuntansi • Penyajian rincian dan penjelasan masing-masing • Pos yang disajikan pada 		<ul style="list-style-type: none"> • Aplikasi Akuntansi Pemerintahan di Indonesia; Dr. Karhi Nisjar S. Ak., M.M • Akuntansi Sektor Publik; Prof. Dr. Mardiasmo, MBA.Ak • Akuntansi Pemerintahan ; Bahtiar Arif Muchlis Iskandar • Akuntansi Sektor Publik ; Muindro Renyowijoyo • Government Budgeting and expenditure control • Akuntansi sektor publik ; UTAMA • Standar Akuntansi Pemerintahan ; PP RI No 71 tahun 2010

Program Studi Magister Akuntansi
Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama

			lembar muka laporan keuangan <ul style="list-style-type: none"> • Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan 	
13	Diharapkan mahasiswa mampu memahami tentang akuntansi persediaan dan investasi dan dapat mengaplikasikannya	Akuntansi Persediaan dan Investasi	<ul style="list-style-type: none"> • Definisi • Umum • Pengakuan • Pengukuran • Beban persediaan • Pengungkapan • Bentuk investasi • Klasifikasi investasi • Pengakuan investasi • Pengukuran investasi • Metode penilaian investasi • Pengakuan hasil investasi • Pelepasan dan pemindahan investasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Aplikasi Akuntansi Pemerintahan di Indonesia; Dr. Karhi Nisjar S. Ak., M.M • Akuntansi Sektor Publik; Prof. Dr. Mardiasmo, MBA.Ak • Akuntansi Pemerintahan ; Bahtiar Arif Muchlis Iskandar • Akuntansi Sektor Publik ; Muindro Renyowijoyo • Standar Akuntansi Pemerintahan ; PP RI No 71 tahun 2010
14	Diharapkan mahasiswa mampu memahami tentang proses akuntansi konstruksi dalam pengerjaan	Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan	<ul style="list-style-type: none"> • Definisi • Konstruksi dalam pengerjaan • Kontrak konstruksi • Penyatuan dan segmentasi kontrak • Konstruksi • Pengakuan konstruksi dalam pengerjaan • Pengukuran • Biaya konstruksi • Pengungkapan 	<ul style="list-style-type: none"> • Aplikasi Akuntansi Pemerintahan di Indonesia; Dr. Karhi Nisjar S. Ak., M.M • Akuntansi Sektor Publik; Prof. Dr. Mardiasmo, MBA.Ak • Government Budgeting and expenditure control • Akuntansi Pemerintahan ; Bahtiar Arif Muchlis Iskandar • Akuntansi Sektor Publik ; Muindro Renyowijoyo • Standar Akuntansi Pemerintahan ; PP RI No 71 tahun 2010
15	Diharapkan mahasiswa mampu dan memahami tentang pos kewajiban yang tercantum dalam laporan keuangan	Akuntansi Kewajiban	<ul style="list-style-type: none"> • Definisi • Umum • Klasifikasi kewajiban • Pengakuan kewajiban <ul style="list-style-type: none"> ◦ Pengukuran kewajiban Utang kepada pihak 	<ul style="list-style-type: none"> • Aplikasi Akuntansi Pemerintahan di Indonesia; Dr. Karhi Nisjar S. Ak., M.M • Akuntansi Sektor Publik; Prof. Dr.

Program Studi Magister Akuntansi
Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama

			<p>ketiga (account payable)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Utang transfer ○ Utang bunga (accrued interest) ○ Utang perhitungan fihak ketiga (pfk) ○ Bagian lancar utang jangka panjang ○ Kewajiban lancar lainnya (other current Liabilities) ○ Utang pemerintah yang tidak diperjualbelikan dan yang diperjualbelikan <ul style="list-style-type: none"> ● Perubahan valuta asing ● Penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo ● Tunggakan ● Restrukturisasi utang ● Penghapusan utang ● Biaya-biaya yang berhubungan dengan utang Pemerintah ● Penyajian dan pengungkapan 	<p>Mardiasmo, MBA. Ak</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Akuntansi Pemerintahan ; Bahtiar Arif Muchlis Iskandar ● Akuntansi Sektor Publik ; Muindro Renyowijoyo ● Standar Akuntansi Pemerintahan ; PP RI No 71 tahun 2010
UAS				

Disahkan oleh :	Diperiksa oleh :	Disusun oleh :	
Dekan Fakultas Ekonomi	Ketua Program Magister Akuntansi	Dosen Pembina	
			
Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak	Prof. Dr. H. Karhi N Sardjudin, M.M., Ak.	Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak	Prof. Dr. H. Karhi N Sardjudin, M.M., Ak.